

ANALISIS KESIAPAN UMKM DALAM PENERAPAN E-KATALOG DI KOTA SAMARINDA

Gita Riski Anggriani, Thalita Rifda Khaerani

**eJournal Administrasi Publik
Volume 14, Nomor 1, 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Analisis Kesiapan UMKM dalam Penerapan E-Katalog di Kota Samarinda.

Pengarang : Gita Riski Anggriani

NIM : 2202016043

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 8 Mei 2026

Pembimbing,



Thalita Rifda Khaerani, M. Si

NIP. 19890922 202203 2 012

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
----------------------	---------------------------------------

Volume	: 14
---------------	-------------

Nomor	: 1
--------------	------------

Tahun	: 2026
--------------	---------------

Halaman	: 39-49
----------------	----------------

ANALISIS KESIAPAN UMKM DALAM PENERAPAN E-KATALOG DI KOTA SAMARINDA

Gita Riski Anggriani ¹, Thalita Rifda Khaerani ²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesiapan UMKM dalam penerapan E-Katalog di Kota Samarinda dan mengidentifikasi faktor penghambatnya. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun fokus penelitian mengacu pada kesiapan UMKM dalam penerapan E-Katalog yaitu peran serta dukungan dari pemimpin, struktur organisasi yang jelas dan efektif, komunikasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat, ketersediaan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mendukung perubahan dan dukungan eksternal beserta faktor penghambatnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian ini menjelaskan, bahwa kesiapan UMKM dalam penerapan E-Katalog di Kota Samarinda sudah berjalan dengan cukup baik namun belum terlaksana dengan maksimal berdasarkan peran serta dukungan dari pemimpin, struktur organisasi yang jelas dan efektif, komunikasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat, ketersediaan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mendukung perubahan dan dukungan eksternal. Adapun yang menjadi faktor penghambat adalah keterbatasan literasi digital dan kemampuan SDM pelaku UMKM, minimnya kesadaran dan motivasi pelaku UMKM, kemudian kesulitan dalam beradaptasi pada pembaruan sistem E-Katalog serta kurang optimalnya integrasi sistem pembayaran E-Katalog.

Kata Kunci : *Kesiapan, Pelaku UMKM, E-Katalog, Literasi Digital*

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi yang signifikan mendorong peningkatan kebutuhan terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui pengadaan barang dan jasa guna mencukupi kepentingan operasional kementerian, lembaga pemerintah, serta organisasi perangkat daerah (Diani & Lubis, 2022). Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dalam sektor pengadaan barang dan jasa, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar dilaksanakan secara cepat, tepat, transparan, dan efisien (Fadillah & Aryansah, 2022). Salah satu bentuk inovasi yang diatur dalam

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: gitariski46@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

peraturan tersebut adalah penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau *e-procurement* (Ahmad, 2024). Sebagai penerapan dari *e-procurement*, pemerintah mengembangkan sistem E-Katalog yang diawasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Kehadiran E-Katalog juga diharapkan dapat memperluas akses pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar penting perekonomian nasional (Callista & Irawan, 2024). Salah satu Kota yang menyumbang jumlah UMKM terbesar di Provinsi Kalimantan Timur adalah Kota Samarinda.

Data dari *Online Single Submission* (OSS) tercatat jumlah UMKM di Kota Samarinda pada tahun 2022 mencapai angka 20.407 dan pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebanyak 37.493 UMKM di Kota Samarinda. Untuk masuk pada sistem E-Katalog Kota Samarinda, UMKM harus siap dari sisi administrasi dan teknis seperti memenuhi beberapa persyaratan yaitu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan kualifikasi Usaha Mikro dan Kecil. Data dari Dinas Koperasi, UMK dan Perindustrian Kota Samarinda tercatat bahwa hingga tahun 2023 sebanyak 16.636 Pelaku UMKM di Kota Samarinda telah terdaftar memiliki NIB. Data ini menunjukkan masih terdapat sejumlah pelaku UMKM di Kota Samarinda yang belum memiliki NIB sehingga hal ini turut menjadi kendala dalam pemenuhan syarat administrasi untuk masuk kedalam sistem E-Katalog di Kota Samarinda.

Nomor	Tahun	Jumlah
1	2023	1.097
2	2024	1.767
3	2025	1.813

Sumber: Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Samarinda (2025)

Data dari Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Kota Samarinda diketahui bahwa jumlah UMKM yang terdaftar di E-Katalog Kota Samarinda mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini tidak berbanding lurus dengan jumlah total UMKM yang telah terdata memiliki NIB di Kota Samarinda. Hal ini juga menjadi bukti bahwa masih banyak UMKM yang belum terdaftar pada sistem E-Katalog. Sehingga hal tersebut menjadi tantangan yang signifikan dalam penerapan E-Katalog di Kota Samarinda.

Pemerintah Kota Samarinda masih menghadapi kendala dalam inventarisasi dan pengelolaan data UMKM secara menyeluruh. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya minat pelaku UMKM untuk mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang disebabkan oleh minimnya edukasi, pemahaman, serta pendampingan terkait kewajiban perpajakan yang kerap menimbulkan kekhawatiran. Kondisi tersebut juga memicu protes dari pelaku UMKM yang tidak terlibat dalam

program bantuan karena belum terdaftar dalam sistem E-Katalog (Borneo.com, 2024).

Upaya optimalisasi pemanfaatan E-Katalog telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui dorongan partisipasi UMKM. Namun, Penerapannya masih belum optimal karena keterbatasan modal, akses informasi, dan kemampuan teknis pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan UMKM dalam penerapan E-Katalog masih rendah dan tidak berbanding lurus dengan tujuan dari penerapan E-Katalog yang dirancang untuk memberdayakan dan mengembangkan UMKM agar dapat bersaing secara digital.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kesiapan UMKM dalam penerapan E-Katalog di Kota Samarinda serta faktor penghambatnya. Melalui analisis ini, diharapkan dapat mengetahui lebih mendalam terkait kesiapan UMKM dalam penerapan E-Katalog dan faktor penghambat dalam menerapkan E-Katalog sebagai media digital pengadaan barang dan jasa pemerintah Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Pelayanan Publik

Menurut Sellang (2019), pelayanan publik merupakan serangkaian proses atau pemberian manfaat yang dilakukan oleh suatu pihak dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai hak masyarakat. Dalam konteks otoritas publik, pelayanan dipandang sebagai bentuk komitmen yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah sebagai fungsi mendasar dari kewenangan publik. Pada hakikatnya, mekanisme pelayanan berlangsung secara rutin dan berkelanjutan yang mencakup seluruh aktivitas organisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Mekanisme tersebut terjadi dalam rangka pemenuhan kebutuhan secara timbal balik antara pihak pemberi layanan dan penerima layanan.

E-Readiness

E-readiness merupakan integrasi dari berbagai indikator yang dievaluasi secara terpisah dimana hasil evaluasi tersebut untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan lebih lanjut (Yani & Irawan, 2022). Jadi, *E-readiness* mengukur seberapa baik suatu organisasi mengimplementasikan teknologi informasi dan mampu memberikan panduan yang dapat membantu pengambil keputusan dalam pengambilan keputusan tentang pengembangan teknologi informasi adanya skor *e-readiness* berfungsi dalam menentukan seberapa jauh *e-government* dalam mencukupi target dan bermanfaat dalam menilai kesiapan lembaga untuk menerapkan *e-government*.

Model Kesiapan Komunitas/CRM Menurut Edwards et al

Teori Model Kesiapan Komunitas/ CRM menurut Edwards et al. (2000) yang memberikan kerangka konseptual penting untuk menilai tingkat kesiapan suatu komunitas dalam menghadapi perubahan di berbagai sektor, termasuk

sosial, ekonomi, dan teknologi (Fauzan, 2024). Model ini memfokuskan lima faktor utama yang memengaruhi kesiapan masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Peran serta dukungan dari pemimpin

Peran serta dukungan dari pemimpin sangatlah penting dalam menggambarkan visi perubahan serta mendorong partisipasi aktif masyarakat.

2. Struktur organisasi yang jelas dan efektif

Struktur organisasi yang jelas dan efektif diperlukan untuk mengelola proses perubahan dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan Keputusan.

3. Komunikasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat

Komunikasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk penggunaan saluran komunikasi yang tepat serta pemberian umpan balik kepada masyarakat.

4. Ketersediaan dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mendukung perubahan

Ketersediaan dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mendukung perubahan, seperti dana, peralatan, dan informasi, menjadi faktor penting.

5. Dukungan eksternal

Dukungan eksternal dari pihak luar, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, sangat diperlukan guna mendorong perubahan yang berkelanjutan.

E-Government

E-Government merupakan upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan kapasitas serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik (Tamara & Widiyarta, 2023). Penerapan teknologi tersebut memungkinkan proses pelayanan dilakukan secara lebih akurat, efisien, cepat, dan hemat biaya, baik bagi masyarakat, mitra usaha, maupun aparatur pemerintah (Wismayanti & Purnamaningsih, 2022). Selain itu, *e-government* memiliki potensi untuk mendorong terbentuknya model pelayanan publik yang baru, modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di seluruh lembaga pemerintahan (Harmitalia et al., 2021).

UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan entitas usaha komersial yang dikelola oleh individu maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan definisi UMKM, penetapan standar usaha dilakukan melalui klasifikasi ke dalam usaha mikro, kecil, dan menengah. Melalui klasifikasi tersebut, pemerintah mengharapkan UMKM dapat berkontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional khususnya melalui pengembangan usaha yang berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar

E-Katalog

E-Katalog merupakan platform yang menyediakan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara transparan dalam mengelola keuangan serta

dilakukan secara cepat dan tepat (Musatari et al., 2022). E-Katalog berisi daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, jumlah ketersediaan, serta harga barang dan jasa dari penyedia. Manfaat penerapan E-Katalog antara lain meningkatkan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyederhanaan proses administrasi, serta memberikan keuntungan bagi pemerintah dalam memperoleh harga yang paling kompetitif dari berbagai penyedia (Mawarni et al., 2020).

Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Nantinya akan didapatkan pemahaman mendalam mengenai masalah-masalah yang terjadi dalam penerapan E-Katalog di Kota Samarinda. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah Faktor yang mempengaruhi Kesiapan UMKM dan faktor penghambat dalam penerapan E-Katalog di Kota Samarinda.

Terdapat dua sumber dan jenis data yang digunakan yaitu data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan key informan yaitu Sekretaris Dinas Koperasi, UMK, dan Perindustrian (DISKUMI) di Kota Samarinda dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kota Samarinda serta informan dari Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro DISKUMI dan Pelaku UMKM di Kota Samarinda. Serta data sekunder yang berasal dari penelitian yang dipublikasi mengenai Kesiapan UMKM dalam Penerapan E-Katalog.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Serta teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) dimana penerapan tekniknya terdapat komponen analisis data yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kesiapan UMKM dalam Penerapan E-Katalog di Kota Samarinda menurut Edward et al

Penerapan pelayanan E-Katalog di Kota Samarinda hadir sebagai langkah untuk memberikan pelayanan yang mengikuti perkembangan teknologi dan mengatasi permasalahan yang dialami seperti praktik KKN dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah dan peningkatan kualitas pelaku UMKM untuk berdaya saing di era digital saat ini.

1. Peran serta dan Dukungan Pemimpin

Peran serta dukungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui DISKUMI Kota Samarinda dalam penerapan E-Katalog telah diwujudkan dengan perumusan kebijakan dan pendampingan seperti sosialisasi serta pelatihan kepada pelaku UMKM. Pelatihan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan diklat

dengan melibatkan BPBJ Kota Samarinda sebagai narasumber untuk memberikan arahan terkait prosedur pendaftaran dan penggunaan sistem E-Katalog. Kegiatan ini hadir karena masih terdapat kesulitan yang dialami oleh pelaku UMKM khususnya usaha mikro dalam melakukan pengisian data dan pemanfaatan sistem E-Katalog. Oleh karena itu, diperlukan proses pembelajaran dan pendampingan lebih lanjut. Pelatihan yang dilakukan ini turut memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemanfaatan E-Katalog sebagai platform pemasaran produk yang terhubung dengan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Samarinda.

Upaya yang dilakukan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam mendorong pelaku UMKM dalam penerapan E-Katalog. Namun demikian, keterbatasan jangkauan dalam pendampingan yang diberikan kepada pelaku UMKM menunjukkan bahwa dukungan tersebut belum berjalan optimal sehingga diperlukan peningkatan edukasi dan perluasan pendampingan agar seluruh pelaku UMKM di Kota Samarinda dapat mengakses informasi dan memanfaatkan E-Katalog secara optimal.

2. Struktur Organisasi yang Jelas dan Efektif

Struktur organisasi Pemerintah Kota Samarinda dalam penerapan E-Katalog di Kota Samarinda telah berjalan secara jelas dan terkoordinasi melalui pembagian tugas dan fungsi antara BPBJ Kota Samarinda dan DISKUMI Kota Samarinda. BPBJ Kota Samarinda berperan sebagai pelaksana teknis yang mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk memberikan arahan kepada OPD dan pendampingan kepada pelaku UMKM yang menjadi penyedia dalam sistem E-Katalog. Pendampingan tersebut dilaksanakan melalui layanan verifikasi pendaftaran yang tersedia di MPP maupun di Kantor BPBJ Kota Samarinda dengan memberikan bimbingan teknis kepada pelaku UMKM dalam melengkapi persyaratan administrasi seperti NIB, NPWP, dokumen legal usaha serta kelengkapan data pada sistem OSS. Proses pendaftaran ini turut didukung oleh hadirnya SOP berupa panduan teknis yang memuat tahapan registrasi dan verifikasi identitas digital, verifikasi profil penyedia, dan verifikasi akses usaha sehingga dapat memudahkan pelaku UMKM dalam memahami alur pendaftaran dan pemenuhan syarat dokumen.

Sementara itu, DISKUMI Kota Samarinda berperan dalam aspek pemberdayaan UMKM melalui kegiatan pembinaan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas SDM yang secara aktif mendorong pelaku UMKM binaan untuk mendaftarkan usahanya ke dalam sistem E-Katalog guna memperluas akses pasar dan mampu meningkatkan keterlibatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelaksanaan peran DISKUMI Kota Samarinda ini juga mengacu pada Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 113 Tahun 2021 mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi DISKUMI Kota Samarinda. Namun demikian, pelaksanaan struktur organisasi dalam penerapan E-Katalog di Kota Samarinda masih memerlukan penguatan pada aspek sumber

daya dan perluasan jangkauan pendampingan agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM secara optimal.

3. Komunikasi yang Efektif antar berbagai Pihak yang Terlibat

Komunikasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui DISKUMI Kota Samarinda dan BPBJ Kota Samarinda dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, serta forum dialog seperti program KOPI ANDI. Kegiatan ini dilakukan melalui pertemuan diklat dengan menghadirkan BPBJ sebagai narasumber guna memberikan arahan teknis dan pemahaman langsung kepada pelaku UMKM terkait prosedur dan mekanisme penggunaan E-Katalog. Selain itu, pelaku UMKM juga diarahkan untuk memanfaatkan media digital pendukung seperti platform inapro.id yang menyediakan informasi, regulasi, dan layanan pendampingan daring dari LKPP. Upaya ini menunjukkan bahwa komunikasi telah berlangsung secara interaktif dan mendukung penyebaran informasi terkait transformasi pengadaan barang dan jasa dari sistem konvensional ke sistem elektronik.

Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Keterbatasan jangkauan sosialisasi menyebabkan belum seluruh pelaku UMKM terlibat secara langsung sehingga sebagian masih memperoleh informasi melalui jalur informal dan inisiatif secara mandiri. Kondisi ini berdampak pada belum meratanya tingkat pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM dalam memanfaatkan E-Katalog. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi komunikasi yang lebih sistematis, berkelanjutan, dan inklusif agar penyebaran informasi dapat menjangkau seluruh pelaku UMKM secara optimal.

4. Dukungan Eksternal

Dukungan eksternal dalam penerapan E-Katalog di Kota Samarinda diwujudkan melalui koordinasi lintas instansi antara DISKUMI Kota Samarinda, BPBJ Kota Samarinda, dan pemerintah pusat melalui LKPP. Dukungan ini dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan arahan teknis yang melibatkan BPBJ Kota Samarinda sebagai narasumber guna meningkatkan pemahaman serta kapasitas pelaku UMKM khususnya dalam pemenuhan persyaratan dan penguasaan teknologi informasi. Selain itu, LKPP turut memberikan dukungan edukatif kepada BPBJ Kota Samarinda dimana selanjutnya berperan dalam membantu dan mengoordinasikan OPD terkait dalam mengatasi kendala dalam penerapan E-Katalog Kota Samarinda.

Meskipun demikian, pelaksanaannya dinilai belum optimal karena masih terdapat keterbatasan fasilitas pendukung seperti perangkat dengan kapasitas memadai dan rendahnya kemampuan teknologi pelaku UMKM. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan eksternal telah tersedia, namun belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pelaku UMKM sehingga diperlukan penguatan melalui penyediaan sarana, pelatihan yang lebih intensif, dan pendampingan berkelanjutan

Faktor Penghambat dalam Penerapan E-Katalog di Kota Samarinda

Dalam penerapan pelayanan ini tidak lepas dari adanya kendala atau hambatan yang dialami seperti:

1. Keterbatasan literasi digital dan kemampuan SDM pelaku UMKM

Masih banyak pelaku UMKM di Kota Samarinda didominasi oleh kelompok usia lanjut yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital menyebabkan keterbatasan kemampuan dalam mengoperasikan teknologi sehingga pelaku UMKM kesulitan memahami alur penggunaan E-Katalog.

2. Minimnya Kesadaran dan Motivasi pelaku UMKM

Sebagian pelaku UMKM menunjukkan tingkat kesadaran dan motivasi yang rendah dalam memanfaatkan E-Katalog. Digitalisasi melalui E-Katalog dianggap rumit dan membutuhkan upaya tambahan sehingga muncul sikap enggan untuk beradaptasi.

3. Kurangnya Sosialisasi dan Pendampingan oleh Pemerintah Kota Samarinda

Kurang optimalnya sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada para pelaku UMKM sehingga masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui keberadaan E-Katalog, termasuk alur pendaftaran, mekanisme kepengurusan dokumen, serta manfaat dan peluang yang dapat diperoleh melalui platform tersebut.

4. Kesulitan dalam Beradaptasi pada Pembaruan Sistem E-Katalog

Banyak pelaku UMKM merasa kesulitan mengadaptasi tampilan antarmuka, fitur, dan mekanisme baru yang diterapkan pada versi terbaru E-Katalog. Perubahan tersebut membutuhkan pembelajaran ulang sementara panduan teknis yang diterima UMKM masih terbatas.

5. Kurang Optimalnya Integrasi Sistem Pembayaran E-Katalog

Ketidakterhubungan fitur pembayaran dengan proses transaksi menimbulkan ketidakpastian dan memperlambat mekanisme pembelian pada sistem E-Katalog. Pelaku UMKM yang membutuhkan alur pembayaran yang jelas dan otomatis sering kali menemui kendala teknis sehingga mengurangi minat mereka untuk memaksimalkan penggunaan sistem E-Katalog.

Penutup

Kesimpulan

Kesiapan UMKM dalam Penerapan E-Katalog di Kota Samarinda sudah berjalan dengan cukup baik namun belum terlaksana dengan maksimal. Dengan melihat dari faktor yang mempengaruhi Kesiapan UMKM dalam penerapan E-Katalog dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peran serta dukungan dari pemimpin sudah berjalan cukup baik melalui pelaksanaan sosialisasi, pendampingan pengurusan dokumen dan pelatihan digitalisasi produk serta administrasi. Namun upaya tersebut belum menjangkau seluruh UMKM di Kota Samarinda.
2. Struktur organisasi antara DISKUMI Kota Samarinda dan BPBJ Kota

Samarinda sudah jelas dan efektif, dalam pembagian tugas dan alur pelayanan yang terstruktur dalam penerapan E-Katalog mempermudah proses pendaftaran dan verifikasi.

3. Komunikasi penerapan E-Katalog dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan teknis serta dialog interaktif lewat program KOPI ANDI. Namun komunikasi belum konsisten dan merata sehingga sebagian pelaku UMKM sulit beradaptasi pada sistem E-Katalog.
4. Ketersediaan dan akses didukung dengan adanya pendampingan administrasi dan teknis dari pemerintah. Namun minimnya literasi digital terutama bagi lanjut usia. keterbatasan sarana pendukung teknologi serta pembaharuan sistem E-Katalog menjadi hambatan dalam beradaptasi
5. Dukungan eksternal dalam penerapan E-Katalog oleh DISKUMI dan BPBJ Kota Samarinda serta LKPP berupa sosialisasi, edukasi dan pendampingan teknis. Namun dukungan ini belum optimal karena belum menyentuh aspek penyediaan sarana digital maupun pelatihan teknologi yang berkelanjutan.

Faktor penghambat dalam penerapan E-Katalog di Kota Samarinda yaitu keterbatasan kemampuan digital pelaku UMKM, rendahnya kesadaran dan motivasi pelaku UMKM, sosialisasi dan pendampingan dari DISKUMI dan BPBJ Kota Samarinda yang kurang optimal, pembaruan sistem dari E-Katalog versi 5 menuju versi 6 menimbulkan kebingungan bagi pelaku dan sistem pembayaran pada E-Katalog belum terintegrasi secara optimal.

Saran

Adapun saran yang dimiliki oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian hingga kesimpulan yang telah dijelaskan mengenai Analisis Kesiapan UMKM dalam Penerapan E-Katalog di Kota Samarinda sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Samarinda melalui DISKUMI Kota Samarinda dan BPBJ Kota Samarinda perlu meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM secara berkala dan menyeluruh di seluruh kecamatan. Kegiatan ini sebaiknya melibatkan narasumber yang kompeten di bidang E-Katalog dan dilengkapi media pembelajaran seperti modul, video panduan, serta sesi praktik untuk memaksimalkan pemahaman khususnya bagi pelaku UMKM berusia lanjut.
2. Pemerintah Kota Samarinda diharapkan dapat memaksimalkan koordinasi rapat dengan pemerintah pusat dan OPD terkait untuk mengatasi kendala teknis seperti integrasi sistem pembayaran pada E-Katalog. Peningkatan stabilitas sistem dan ketersediaan fitur transaksi yang efisien akan mendorong kenyamanan dan kepercayaan pelaku UMKM dalam memanfaatkan E-Katalog.
3. Diperlukannya dukungan finansial dalam hal penyediaan sarana pendukung teknologi seperti perangkat komputer dengan kapasitas yang besar untuk membantu pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan perangkat digital dalam

pemanfaatan E-Katalog.

Daftar Pustaka

- Ahmad, A. (2024). Implementasi E Katalog Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Pekanbaru. *SEMINAR NASIONAL POLITEKNIK PENGADAAN NASIONAL*, 589–594. Diunduh dari: <https://forum.upbatam.ac.id/index.php/prosiding/article/view/9395>
- Borneo.com, J. (2024). *Persoalan e-katalog dan Pajak bagi UMKM Jadi Perhatian Khusus DPRD Samarinda*. Jurnal Borneo.Com. Diunduh dari: <https://jurnalborneo.com/persoalan-e-katalog-dan-pajak-bagi-umkm-jadi-perhatian-khusus-dprd-samarinda/>
- Callista, S. L. N., & Irawan, B. (2024). Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Aplikasi E-Katalog Lokal Dalam Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bontang. *Journal Administrasi Publik*, 12(3), 766–776. Diunduh dari: [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2024/09/232_Hlmn_Persetujuan_Jurnal_Shania_Lutfiah_2020_signed_\(09-23-24-12-35-32\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2024/09/232_Hlmn_Persetujuan_Jurnal_Shania_Lutfiah_2020_signed_(09-23-24-12-35-32).pdf)
- Diani, F., & Lubis, F. A. (2022). Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1970–1981. Diunduh dari: <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5794>
- Fadillah, et al. (2022). Analisis Pelaksanaan Pembelian Kendaraan Dinas Melalui E-Katalog di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Dinamika Manajemen dan Kebijakan Publik*, 2(2), 19-24. Diunduh dari : <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/dinamikamanajemen>
- Fauzan, B. H. (2024). Analisis Kesiapan Digital Masyarakat Di Desa Banyubiru Kabupaten Semarang Terhadap Digitalisasi Perdesaan. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(3), 1–23. Diunduh dari: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/45652>
- Harmitalia, M., Irawan, B., & Khaerani, T. R. (2021). Efektivitas dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspur Online Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Samarinda. *JPBM (Journal of Policy & Bureaucracy Management)*, 2(2), 103–114. Diunduh dari: [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2021/10/eJournal_Mita_Harmitalia_1702015055\(1\)%20\(10-01-21-04-39-19\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2021/10/eJournal_Mita_Harmitalia_1702015055(1)%20(10-01-21-04-39-19).pdf)
- Mawarni, Mega., Gading Gamaputra, & Selvi Diana Meilinda. (2020). Penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi E-Purchasing dan E-Katalog. *Wacana Publik*, 14(02), 81–92. Diunduh dari: <https://doi.org/10.37295/wp.v14i02.50>

- Musatari, N., Suardi, W., & Syukri, U. (2022). Analisis Sentimen Media Sosial: Penerapan E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(3), 193–200. Diunduh dari: <https://doi.org/10.55678/prj.v10i3.702>.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Sellang, Kamaruddin, et al. 2019. *Strategi dalam Peningkatan Kualitas pelayanan Publik (Dimensi, Konsep, Indikator, dan Implementasinya)*. Purworejo: Qiara Madia Partner.
- Tamara, Gea., & Agus, Widiyarta. (2023). Penerapan E-Government dalam Pelayanan Perizinan Online melalui “SIMPONIE” di DPMPSTSP Kabupaten Serang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 5(1), 23–27. Diunduh dari: <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i1.571>.
- Wismayanti, Kadek. W. D., & Putu, Eka, P. (2022). Transformasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Di Masa Era New Normal Pada Pemerintah Daerah Badung. *Jurnal media Bina*, 16(10), 7507–7518. Diunduh dari: <https://doi.org/10.33578/mbi.v16i10.1>.
- Yani, D. A., & Irawan, B. (2022). *Faktor Penghambat E-Readiness Sektor Publik (Studi Pada Program Layanan Darurat Call Center 112 Kota*. 9(4), 5887–5896. Diunduh dari: [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2022/08/eJurnal%20Dewi%20Andy%20Yani%201802015070%20\(08-29-22-03-41-18\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2022/08/eJurnal%20Dewi%20Andy%20Yani%201802015070%20(08-29-22-03-41-18).pdf)